



Agar Masyarakat Rentan Tak Kesulitan

■ Puskesmas di Kota Yogya Sisir Warga Terancam Kehilangan Jaminan Kesehatan

YOGYA, TRIBUN - Seluruh Puskesmas di Kota Yogyakarta diinstruksikan menyisir warga yang mengalami lonjakan status desil dan terancam kehilangan jaminan kesehatan gratis. Langkah tersebut diambil supaya masyarakat rentan tidak mengalami kesulitan mengakses pelayanan medis mendasar akibat dinamika pendataan di tingkat pusat.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menegaskan bahwa penanganan masalah jaminan kesehatan memang tidak serta merta dibebankan kepada perangkat kelurahan. Menurutnya, penanganan bisa semakin cepat jika diserahkan secara langsung pada pimpinan Puskesmas, yang sudah memiliki basis data serta profil kesehatan warga di wilayahnya.

"Puskesmas itu sudah punya data. Jadi, yang langsung punya data dan profil itu pimpinan Puskesmas. Saya sudah perintahkan pimpinan Puskesmas," ujarnya, Sabtu (6/9).

Langkah penyisiran warga secara langsung ini dipicu temuan di lapangan terkait adanya warga lansia dan sakit-sakitan yang hidup seorang diri di kawasan Jogoyudan, namun status desilnya naik ke rentang 6-10. Terang saja, kenaikan desil yang jauh dari kondisi riil tersebut memicu risiko penonaktifan jaminan kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS miliknya.

Hasto menegaskan, instansi terkait dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) telah dikirim untuk mengecek kondisi sesungguhnya di lapangan. Ia memastikan, warga yang terlempar dari skema PBI BPJS Kesehatan pusat akan langsung di-cover melalui anggaran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) atau PBI APBD.

"Kalau BPJS-nya tidak ter-cover, nanti kita aktifkan dengan dana Jamkesda. Bagi saya kesehatan itu nomor satu. Orang mau punya apa

Kalau BPJS-nya tidak ter-cover, nanti kita aktifkan dengan dana Jamkesda. Bagi saya kesehatan itu nomor satu. Orang mau punya apa saja kalau tidak sehat ya tidak ada gunanya.

saja kalau tidak sehat ya tidak ada gunanya," ujarnya.

"Karena disekolahkan pun kalau tidak sehat tidak bisa, diberi jalan atau lampu penerangan, kalau kondisinya tidak sehat ya tidak ada gunanya," tambah pejabat berlatar belakang dokter kandungan itu.

Kendati demikian, Hasto bilang, komitmennya dalam menjamin kesehatan masyarakat, praktis membuat alokasi anggaran kesehatan daerah membengkak. Dijelaskan, dari ketentuan batas minimal mandatory spending sebesar 10 persen, Pemkot Yogyakarta saat ini melampauinya hingga lebih dari 24 persen dari APBD.

"Menang anggaran kesehatan kita sudah over. Normalnya, mandatory itu 10 persen, dan kita sekarang sudah sampai lebih dari 24 persen, dua kali lipat lebih. Tapi, ya demi warga," ungkapnya.

Oleh sebab itu, meski Pemkot Yogyakarta masih membakup pembiayaan lewat PBI APBD, Hasto menyebut upaya verifikasi dan validasi data tetap berjalan rutin. Pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat setiap tiga bulan sekali supaya pemutakhiran data desil di daerah disetujui, sehingga beban pembiayaan APBD bisa lebih

proporsional. Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Lana Unwanah, menyampaikan bahwa penonaktifan PBI JKN terjadi imbas penyangkutan data di tingkat pusat. Berdasarkan data terkini, dari 21 ribu warga yang kehilangan akses, sekitar 16 ribu di antaranya sudah berhasil tertangani untuk memperoleh kembali jaminan kesehatan gratis.

"Selama penduduk Kota Yogyakarta, memiliki KTP Kota Yogyakarta, bukan pekerja penerima upah, dan memenuhi ketentuan, kepesertaan dapat diaktifkan melalui skema PBI APBD," tegasnya.

Lana mengimbau warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan mendesak, terutama penderita penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, kanker, TB, hingga pasien cuci darah, agar tidak menunggu proses verifikasi desil selesai jika kartu BPJS-nya menda-dak nonaktif.

Warga cukup mendatangi Puskesmas terdekat dengan membawa dokumen kependudukan seperti KTP, KK, atau IRD untuk bantu aktivasi di loket Jamkesda.

Sementara, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Supriyanto, menuturkan, warga yang merasa data desilnya tidak sesuai dengan kondisi riil dapat mengajukan pemutakhiran data. Karena Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) diperbarui secara berkala setiap tiga bulan sekali, publik diimbau aktif mengecek data dan segera ajukan perbaikan jika menemukan ketidaksesuaian.

"Pertama, masyarakat dapat mengusulkan pemutakhiran data secara mandiri lewat aplikasi Cek Bansos. Atau, bisa ditempuh melalui mekanisme musyawarah kelurahan. Warga cukup menyampaikan kondisi riilnya kepada pengurus RT/RW setempat," terangnya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Kesehatan			

Yogyakarta, 17 Oktober 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005